

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Arah Kebijakan	1
B. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019	2
C. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	6
1. Target Prioritas Nasional	7
2. Target Kementerian/Lembaga	8
BAB II APBN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2019	12
A. Komposisi Alokasi Anggaran Tahun 2019	12
B. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019	12
1. Kegiatan Pusat	13
a. Kegiatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama daerah	13
b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	15
c. Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	17
d. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	19
e. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi	21
f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	22
2. Kegiatan Dekonsentrasi	24
a. Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	24
b. Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	25
c. Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah	26
3. Kegiatan Tugas Pembantuan	26
Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan antar Negara dan Pulau-pulau Kecil Terluar	31
BAB III PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019	29
A. Realisasi Anggaran	29
1. Realisasi Kegiatan Pusat	29
a. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	29

b.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	32
c.	Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	35
d.	Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	38
e.	Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi	40
f.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	41
2.	Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi	43
a.	Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	43
b.	Dekonsentrasi Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah	44
c.	Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah	45
3.	Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan	45
	Pembangunan Sarpras Pemerintahan di Kawasan Perbatasan antar Negara dan Pulau-pulau Kecil Terluar	45
B.	Capaian Kinerja	46
1.	Pencapaian Target Prioritas Nasional	46
2.	Pencapaian Target Prioritas Kementerian/Lembaga	60
C.	Permasalahan	88
D.	Tindak Lanjut	89
BAB IV	PENUTUP	91
A	Kesimpulan	91
B	Rekomendasi	91